



## Analisis Sosiologis Reproduksi Ruang Kapitalis dan Eksklusi PKL di Kawasan CPI Makassar

Muhamad Saifullah<sup>1\*</sup>, Muhammad Nawir<sup>2</sup>, Risfaisal<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Pendidikan Sosiologi, Universitas Muhammadiyah Makassar

\*Email Correspondence: [saifullahmuhamad40@gmail.com](mailto:saifullahmuhamad40@gmail.com)

### Abstract

*The development of the Center Point of Indonesia (CPI) area in Makassar represents one of the strategic urban projects that reflects capital- and investment-driven development practices. This study aims to analyze the process of capitalist spatial reproduction and its impacts on the social and economic conditions of communities surrounding the CPI area, particularly street vendors and local residents. The research employs a qualitative approach using a case study method. Data were collected through field observations, in-depth interviews, and documentation, and were analyzed descriptively using a qualitative approach grounded in the theory of capitalist spatial reproduction. The findings indicate that the development of CPI has led to a shift in the function and meaning of public space from an inclusive social space to a selective, controlled, and economically oriented space. Public space is managed according to aesthetic and investment-driven logics, thereby restricting access for lower-income groups, particularly street vendors. The social impacts include weakened social interactions among local communities and an increasing sense of alienation from public space, while economically the development of CPI exhibits a dualistic character by promoting urban economic growth without equitable distribution of its benefits. This study concludes that without inclusive and participatory spatial governance, capital-based urban development has the potential to deepen social inequality and spatial injustice in urban areas.*

**Key Words:** *Public space, capitalist spatial reproduction, urban development, CPI Makassar*

### Abstrak

Pembangunan kawasan Center Point of Indonesia (CPI) Makassar merupakan salah satu proyek strategis perkotaan yang merepresentasikan praktik pembangunan berbasis kapital dan investasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses reproduksi ruang kapitalis serta dampaknya terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan CPI, khususnya pedagang kaki lima dan warga lokal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan perspektif teori reproduksi ruang kapitalis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan CPI mendorong terjadinya pergeseran fungsi dan makna ruang publik dari ruang sosial yang inklusif menjadi ruang yang selektif, terkontrol, dan berorientasi pada kepentingan ekonomi. Ruang publik dikelola berdasarkan logika estetika dan investasi, sehingga membatasi akses kelompok ekonomi kecil, khususnya pedagang kaki lima. Dampak sosial yang muncul antara lain melemahnya interaksi sosial masyarakat lokal dan meningkatnya rasa keterasingan terhadap ruang publik, sementara dari sisi

ekonomi pembangunan CPI bersifat dualistik karena mendorong pertumbuhan ekonomi kota tetapi tidak terdistribusi secara merata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tanpa pengelolaan ruang yang inklusif dan partisipatif, pembangunan kawasan berbasis kapital berpotensi memperdalam ketimpangan sosial dan ketidakadilan spasial di perkotaan.

**Kata Kunci:** Ruang publik, reproduksi ruang kapitalis, pembangunan perkotaan, CPI Makassar

## Pendahuluan

Pembangunan kawasan perkotaan di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan kecenderungan yang semakin kuat terhadap orientasi pertumbuhan ekonomi dan investasi (Fitria Pida et al., 2025). Kota-kota besar berlomba menghadirkan ruang-ruang baru yang merepresentasikan modernitas, daya saing global, serta citra kota kelas dunia. Dalam konteks ini, ruang kota tidak lagi dipandang semata sebagai wadah kehidupan sosial masyarakat, tetapi sebagai aset strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan berfungsi mendukung akumulasi modal. Konsekuensinya, pembangunan ruang perkotaan sering kali menempatkan kepentingan ekonomi sebagai prioritas utama, sementara dimensi sosial dan keberlanjutan ruang publik cenderung terpinggirkan (Maulidya, 2025).

Salah satu bentuk konkret dari kecenderungan tersebut adalah pembangunan kawasan Center Point of Indonesia (CPI) di Kota Makassar (Maulidya, 2025). Kawasan ini dikembangkan melalui proyek reklamasi pantai dan dirancang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mengintegrasikan fungsi bisnis, pariwisata, dan ruang rekreasi. CPI dipromosikan sebagai ikon kota modern yang merepresentasikan kemajuan pembangunan Makassar. Namun, di balik narasi pembangunan dan modernisasi tersebut, CPI juga menghadirkan dinamika sosial yang kompleks, terutama terkait perubahan fungsi ruang publik, akses masyarakat, serta distribusi manfaat pembangunan.

Ruang publik secara normatif dipahami sebagai ruang bersama yang terbuka, inklusif, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Ruang ini berperan penting dalam membangun interaksi sosial, memperkuat kohesi masyarakat, serta menjadi arena ekspresi kehidupan sosial dan budaya kota. Akan tetapi, dalam praktik pembangunan perkotaan berbasis kapital, ruang publik kerap mengalami komodifikasi, di mana akses dan penggunaannya diatur berdasarkan logika pasar, estetika, dan kepentingan ekonomi. Proses ini menyebabkan ruang publik kehilangan karakter inklusifnya dan berubah menjadi ruang yang selektif serta terkontrol.

Fenomena tersebut dapat dipahami melalui konsep reproduksi ruang kapitalis, yang menekankan bahwa ruang diproduksi dan dikelola sesuai dengan kepentingan sistem ekonomi dominan. Dalam kerangka kapitalisme, ruang kota tidak bersifat netral, melainkan menjadi arena perebutan kepentingan antara aktor bermodal, negara, dan masyarakat. Pembangunan ruang tidak hanya menghasilkan bentuk fisik tertentu, tetapi juga membentuk relasi sosial, pola perilaku, dan struktur ekonomi yang baru (Isra et al., 2025). Dengan demikian, ruang publik yang dihasilkan berpotensi menciptakan ketimpangan akses dan marginalisasi kelompok masyarakat tertentu, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku ekonomi informal.

Di kawasan CPI Makassar, reproduksi ruang kapitalis tampak dalam pengaturan ruang yang menekankan keteraturan visual, kenyamanan wisata, dan citra eksklusif kawasan. Aktivitas ekonomi informal, seperti pedagang kaki lima, diposisikan sebagai elemen yang tidak sesuai dengan estetika dan ketertiban kawasan, sehingga keberadaannya dibatasi secara ruang dan waktu (Rosandi Sakir, 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara

kepentingan pembangunan kota berbasis investasi dengan kebutuhan ekonomi masyarakat kecil yang menggantungkan hidup pada ruang publik. Selain itu, pembangunan CPI juga membawa dampak sosial dan ekonomi yang bersifat ambivalen. Di satu sisi, kawasan ini berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kota, peningkatan investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Namun, di sisi lain, pembangunan tersebut juga memunculkan persoalan ketimpangan, penggusuran simbolik, serta hilangnya ruang hidup dan mata pencaharian tradisional masyarakat pesisir. Masyarakat lokal dihadapkan pada tuntutan untuk beradaptasi dengan struktur ruang dan ekonomi baru yang tidak selalu sejalan dengan kapasitas dan kebutuhan mereka.

Meskipun kajian mengenai reklamasi pesisir Makassar telah banyak dilakukan, sebagian besar literatur terdahulu cenderung berfokus pada dimensi dampak lingkungan serta pertumbuhan ekonomi makro pasca-pembangunan. Terdapat kekosongan kajian (*research gap*) yang secara spesifik membedah bagaimana ruang tersebut diproduksi secara sosial dan simbolik. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menggunakan kerangka sosiologi ruang Henri Lefebvre, guna menelaah bagaimana reproduksi ruang kapitalis di kawasan CPI tidak hanya mengubah lanskap fisik, tetapi juga menciptakan marginalisasi terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui mekanisme kontrol ruang yang bersifat eksklusif. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana reproduksi ruang kapitalis berlangsung di kawasan Center Point of Indonesia Makassar serta bagaimana dampaknya terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar, khususnya pedagang kaki lima dan warga lokal (Hakim et al., 2023). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam kajian sosiologi perkotaan dan menjadi bahan pertimbangan bagi perumusan kebijakan pembangunan kota yang lebih inklusif dan berkeadilan.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis reproduksi ruang kapitalis serta dampak sosial dan ekonomi pembangunan kawasan Center Point of Indonesia (CPI) Makassar (Ilhami et al., 2024). Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam perubahan fungsi dan makna ruang publik serta pengalaman sosial masyarakat yang terdampak pembangunan kawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan informan kunci agar data yang diperoleh memiliki kedalaman representatif. Penelitian ini melibatkan 12 informan utama, yang terdiri dari, delapan orang pedagang kaki lima (PKL) yang terdampak langsung oleh regulasi zonasi di kawasan CPI Makassar dan empat warga lokal yang bermukim di sekitar wilayah pesisir untuk memberikan perspektif mengenai perubahan akses ruang publik. Kriteria inklusi informan didasarkan pada lama waktu beraktivitas di kawasan tersebut (minimal 2 tahun) dan keterlibatan aktif dalam pemanfaatan ruang publik CPI Makassar.

Penelitian dilakukan di kawasan CPI dan wilayah permukiman di sekitarnya. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan guna mengamati kondisi fisik ruang, pola pemanfaatan ruang publik, serta aktivitas sosial dan ekonomi yang berlangsung (Suminar & Sari, 2021). Selain itu, wawancara mendalam dilakukan terhadap pedagang kaki lima dan masyarakat sekitar untuk menggali persepsi, pengalaman, dan strategi adaptasi mereka terhadap perubahan ruang akibat pembangunan CPI. Pengumpulan data juga didukung oleh dokumentasi berupa catatan lapangan dan bahan pendukung lain yang relevan.

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui proses reduksi, pengorganisasian, dan interpretasi data (Miladiah et al., 2020). Analisis dilakukan dengan menggunakan perspektif teori reproduksi ruang kapitalis untuk memahami relasi antara produksi ruang, kepentingan modal, serta dampaknya terhadap akses ruang, relasi sosial, dan kondisi ekonomi masyarakat lokal.

## Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan kawasan Center Point of Indonesia (CPI) Makassar merupakan representasi nyata dari praktik reproduksi ruang kapitalis dalam konteks perkotaan kontemporer. Pembangunan kawasan ini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai upaya penataan ruang fisik atau peningkatan kualitas infrastruktur kota, melainkan sebagai proses produksi ruang yang sarat dengan kepentingan ekonomi dan logika akumulasi modal. Ruang dalam konteks CPI diproduksi dan direkayasa bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat secara luas, tetapi juga diarahkan secara sistematis untuk mendukung investasi, pengembangan sektor pariwisata, serta penciptaan nilai tambah ekonomi bagi pemilik modal dan aktor-aktor ekonomi formal. Dengan demikian, ruang kota tidak lagi bersifat netral, melainkan menjadi instrumen strategis dalam mekanisme kapitalisme perkotaan.

Dalam kerangka ini, pembangunan CPI memperlihatkan bagaimana ruang publik mengalami pergeseran fungsi dan makna yang cukup signifikan. Ruang yang sebelumnya dipahami sebagai arena interaksi sosial yang terbuka, inklusif, dan memungkinkan terjadinya pertemuan berbagai kelompok sosial, secara bertahap bertransformasi menjadi ruang yang selektif, terkontrol, dan berorientasi pada konsumsi. Ruang publik tidak lagi dimaknai sebagai tempat berlangsungnya aktivitas sosial yang berkelanjutan, melainkan sebagai komoditas yang memiliki nilai ekonomi dan citra tertentu. Orientasi tersebut tercermin dari desain kawasan, pengelolaan aktivitas, serta pengaturan perilaku pengguna ruang yang diarahkan untuk menciptakan suasana yang sesuai dengan kepentingan pasar dan pariwisata (Wahyudi & Nugroho, 2022).

Transformasi ruang publik di kawasan CPI menunjukkan dominasi logika kapital dalam proses perencanaan dan pengelolaan ruang kota. Meskipun secara normatif kawasan ini dinyatakan sebagai ruang terbuka untuk umum, dalam praktiknya akses terhadap ruang tersebut tidak sepenuhnya bebas dan setara. Berbagai mekanisme pengendalian diterapkan melalui regulasi formal, pengawasan keamanan, serta penerapan standar estetika tertentu yang menentukan siapa yang dianggap pantas dan tidak pantas untuk menggunakan ruang. Standar-standar ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penataan visual, tetapi juga sebagai alat seleksi sosial yang secara implisit membatasi keberadaan kelompok-kelompok tertentu, khususnya mereka yang tidak sesuai dengan citra kawasan yang diinginkan (Stefani et al., 2025).

Salah satu bentuk nyata dari selektivitas ruang di CPI adalah pembatasan terhadap aktivitas ekonomi informal, khususnya keberadaan pedagang kaki lima. Aktivitas berdagang di ruang publik dipersepsikan sebagai praktik yang tidak sejalan dengan citra modern, tertata, dan eksklusif yang ingin ditampilkan oleh kawasan CPI. Akibatnya, pedagang informal sering kali dianggap sebagai pengganggu estetika dan ketertiban kawasan, sehingga keberadaannya dibatasi baik dari segi lokasi maupun waktu operasional. Pembatasan ini menunjukkan bahwa pengelolaan ruang publik di CPI tidak dilakukan secara netral, melainkan berpihak pada kepentingan ekonomi formal, investor, dan pemilik modal besar, sementara kelompok ekonomi kecil dan informal cenderung terpinggirkan.

Dari perspektif sosial, pembangunan CPI membawa implikasi yang cukup mendalam terhadap pola interaksi masyarakat. Ruang pesisir yang sebelumnya berfungsi sebagai ruang interaksi kolektif bagi masyarakat lokal tempat berlangsungnya berbagai aktivitas sosial, budaya, dan ekonomi secara berkelanjutan mengalami perubahan fungsi menjadi ruang rekreasi yang bersifat individual, temporer, dan berorientasi pada konsumsi. Aktivitas sosial yang bersifat komunal dan berlangsung secara rutin secara perlahan tergantikan oleh aktivitas rekreatif yang lebih bersifat insidental, seperti berwisata, berjalan-jalan, dan berfoto.

Perubahan ini berdampak pada melemahnya intensitas interaksi sosial dan berkurangnya ruang bagi terbentuknya ikatan sosial yang kuat di antara anggota masyarakat lokal.

Selain itu, dominasi pengunjung dari luar kawasan serta penerapan aturan penggunaan ruang yang ketat turut memengaruhi rasa kepemilikan masyarakat terhadap ruang publik di lingkungan tempat tinggal mereka sendiri. Masyarakat sekitar CPI tidak lagi sepenuhnya merasa bahwa ruang tersebut merupakan bagian integral dari kehidupan sosial mereka. Sebaliknya, ruang publik tersebut dipersepsikan sebagai ruang yang “asing” dan lebih diperuntukkan bagi kepentingan pengunjung, wisatawan, atau kelompok tertentu yang memiliki kapasitas ekonomi dan sosial yang lebih tinggi. Kondisi ini memunculkan perasaan keterasingan dan jarak sosial antara masyarakat lokal dengan ruang publik yang secara geografis berada di wilayah mereka sendiri (Muslimin & Gunawan, 2025).

Marginalisasi sosial dan ekonomi paling nyata dirasakan oleh kelompok pedagang kaki lima. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pedagang kecil menghadapi ketidakpastian yang tinggi terkait ruang dan waktu berjualan. Mereka tidak memiliki jaminan akses yang stabil terhadap ruang publik, sehingga aktivitas ekonomi yang dijalankan bersifat rentan dan tidak berkelanjutan. Selain itu, pedagang kaki lima juga kerap mengalami stigma sosial sebagai pihak yang mengganggu ketertiban, kebersihan, dan estetika kawasan. Stigma ini tidak hanya berdampak pada pembatasan aktivitas mereka, tetapi juga memengaruhi posisi tawar pedagang kecil dalam bernegosiasi dengan pihak pengelola kawasan dan aparat terkait (Ni Made Musiyani Anjasmari & Oqta Hasna, 2023).

Dalam kondisi tersebut, pedagang kaki lima terpaksa memanfaatkan ruang-ruang marginal yang tersisa, seperti sudut-sudut kawasan yang kurang strategis, area dengan fasilitas terbatas, atau lokasi yang jauh dari arus utama pengunjung. Ruang-ruang marginal ini umumnya tidak didukung oleh infrastruktur yang memadai dan tidak memberikan jaminan keamanan maupun keberlanjutan usaha. Situasi ini mencerminkan adanya ketimpangan yang nyata dalam akses terhadap ruang publik serta menunjukkan bagaimana stratifikasi sosial direproduksi melalui mekanisme pengelolaan ruang kota. Kelompok dengan modal ekonomi dan sosial yang lebih kuat memperoleh akses yang lebih luas dan aman, sementara kelompok rentan harus beradaptasi dengan kondisi yang serba terbatas.

Dari sisi ekonomi, pembangunan CPI memiliki karakter dualistik yang menimbulkan dampak yang tidak seragam bagi berbagai kelompok masyarakat. Di satu sisi, kawasan ini berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kota melalui peningkatan investasi, pengembangan sektor pariwisata, serta penciptaan lapangan kerja baru. Kehadiran kawasan CPI juga memperkuat citra Makassar sebagai kota modern dan berdaya saing, yang pada gilirannya dapat menarik minat investor dan wisatawan. Dampak positif ini menunjukkan bahwa pembangunan CPI memiliki potensi sebagai motor penggerak ekonomi perkotaan.

Namun, di sisi lain, manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh pembangunan CPI tidak terdistribusi secara merata. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk pedagang informal dan masyarakat pesisir, justru menghadapi berbagai tekanan ekonomi akibat perubahan struktur ruang dan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut. Hilangnya mata pencaharian tradisional, seperti kegiatan melaut atau berdagang secara informal di ruang publik, memaksa sebagian masyarakat untuk mencari alternatif penghidupan yang sering kali tidak stabil. Selain itu, persaingan dengan usaha bermodal besar dan formal semakin mempersempit peluang ekonomi bagi kelompok kecil, sementara meningkatnya biaya hidup di sekitar kawasan CPI menambah beban ekonomi yang harus ditanggung oleh masyarakat lokal (Kurniawan et al., 2024). Tekanan ekonomi tersebut juga berdampak pada perubahan pola kehidupan masyarakat sekitar. Meningkatnya nilai lahan dan biaya sewa di sekitar kawasan CPI mendorong terjadinya proses eksklusi sosial secara tidak langsung, di mana kelompok berpenghasilan rendah semakin sulit untuk bertahan di wilayah tersebut. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi memicu terjadinya pergeseran komposisi sosial

penduduk dan memperkuat segregasi sosial di wilayah perkotaan. Ruang kota, dalam konteks ini, tidak hanya menjadi arena aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi medium reproduksi ketimpangan sosial.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa pembangunan CPI Makassar mencerminkan paradoks ruang publik dalam kota kapitalis. Di satu sisi, ruang publik dibangun dan dipromosikan sebagai simbol kemajuan, modernitas, dan keterbukaan kota terhadap dunia luar. Di sisi lain, dalam praktiknya ruang tersebut berfungsi secara selektif dan eksklusif, dengan akses dan manfaat yang lebih banyak dinikmati oleh kelompok tertentu. Paradoks ini mengungkap adanya ketegangan antara tujuan pembangunan ekonomi dan prinsip keadilan sosial dalam pengelolaan ruang kota.

Tanpa adanya pengelolaan ruang yang lebih inklusif dan partisipatif, proses reproduksi ruang kapitalis seperti yang terjadi di CPI berpotensi memperdalam ketimpangan sosial dan meminggirkan kelompok-kelompok rentan. Ruang publik yang seharusnya menjadi sarana pemersatu dan wahana interaksi sosial justru berisiko kehilangan fungsi sosialnya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembangunan dan pengelolaan ruang kota yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan citra kota, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sosial, keadilan akses, serta perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang memiliki posisi rentan dalam struktur ekonomi perkotaan.

Dengan demikian, pembangunan CPI Makassar dapat dipahami sebagai refleksi dari dinamika pembangunan kota modern yang dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan kebutuhan sosial masyarakat. Analisis ini menegaskan bahwa ruang publik bukan sekadar entitas fisik, melainkan produk sosial yang sarat dengan relasi kekuasaan, kepentingan ekonomi, dan nilai-nilai ideologis. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga fungsi sosial ruang publik memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan agar ruang kota dapat benar-benar berfungsi sebagai ruang bersama yang adil, inklusif, dan berkelanjutan perkotaan.

## Simpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan Center Point of Indonesia (CPI) Makassar merupakan manifestasi nyata dari reproduksi ruang kapitalis dalam konteks perkotaan modern, di mana ruang publik tidak hanya difungsikan sebagai sarana interaksi sosial, tetapi juga dikonstruksi sebagai instrumen ekonomi yang berorientasi pada investasi dan akumulasi modal. Proses ini menyebabkan terjadinya pergeseran fungsi dan makna ruang publik dari ruang yang inklusif dan komunal menuju ruang yang selektif, terkontrol, serta berorientasi pada konsumsi.

Dominasi logika kapital dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan CPI berdampak pada terbatasnya akses kelompok tertentu, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku ekonomi informal, yang mengalami marginalisasi baik secara sosial maupun ekonomi. Meskipun pembangunan CPI memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kota dan penguatan citra perkotaan, manfaat tersebut tidak terdistribusi secara merata dan justru berpotensi memperdalam ketimpangan sosial. Oleh karena itu, pembangunan dan pengelolaan ruang publik di kawasan perkotaan perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkeadilan agar ruang publik tetap menjalankan fungsi sosialnya sebagai ruang bersama yang mampu mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan.

## Referensi

Fitria Pida, D., Aini, K. N., & Amelia Putri, C. (2025). Dampak urbanisasi terhadap perkembangan kota di indonesia: Tinjauan dari aspek ekonomi pembangunan. *WISSEN* :

- Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 226–238.  
<https://doi.org/10.62383/wissen.v3i1.562>
- Hakim, M., Sulfianti, A., & Nursiada, N. (2023). Dampak reklamasi pantai seruni terhadap ekonomi masyarakat bantaeng. *Jurnal Ekonomi Utama*, 2(3), 348–355.  
<https://doi.org/10.55903/juria.v2i3.222>
- Ilhami, M. W., Nurfajriani, W. V., Mahendra, A., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2024). Penerapan metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(9), 462–469.
- Isra, M., Sakti, H. H., Radhinal, Y., & Ahmad, D. N. A. (2025). Rekonstruksi Ruang Peri-Urban: Interaksi Sosial-Ekonomi Dalam Dinamika Kutub Pertumbuhan dan Proses Gentrifikasi di Kawasan Perkotaan Bulukumba. *Jurnal Peweka Tadulako*, 4(1), 1–17.  
<https://doi.org/10.22487/peweka.v4i1.47>
- Kurniawan, R., Iriani, F., & Minrohayati. (2024). Dampak Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Marginal di Indonesia. *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies*, 5(2), 267–278.
- Maulidya, A. (2025). Kajian Tentang Kota Berkelanjutan di Indonesia (Studi Kasus di Kota Metro, Lampung). *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(1), 850–861.  
<https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.1147>
- Miladiyah, A., Nurhaida, & Karimah, N. I. (2020). Analisis Kemampuan Representasi Matematis Siswa dalam Menyelesaikan Soal Cerita Program Linear. *JRPMS (Jurnal Riset Pembelajaran Matematika Sekolah)*, 4(1), 9–14.
- Muslimin, F., & Gunawan, G. (2025). Relasi Antar Etnis dalam Ruang Multikultural di Pasar Gede Hardjonagoro Kota Surakarta. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 7(1), 1–13. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v7i1.753>
- Rosandi Sakir, A. (2024). Penataan Pedagang Kaki Lima di Sekitar Gedung Olahraga Sudiang Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(2), 187–200.  
<https://doi.org/10.56552/jisipol.v5i2.159>
- Stefani, A., Sutomo, T., & Nugraha, D. (2025). Kajian hukum rptra jakarta bagi akses ruang umum di daerah padat. *Borneo Law Review*, 9(1), 1–12.  
<https://doi.org/10.35334/dc6n1e42>
- Suminar, L., & Sari, P. A. (2021). Pola Penggunaan Ruang Terbuka Publik di Kawasan Wisata Malioboro Pada Masa Pandemi. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 26(1), 23–32.
- Wahyudi, R., & Nugroho, H. (2022). Mengaburnya Ruang Publik dan Ruang Privat dalam Praktik Konsumsi Media Baru Blurring of Public and Private Spaces in New Media Consumption Practices. *Jurnal Komunikasi*, 16(2), 101–112.  
<https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol16.iss2.art1>